



**Korupsi Bermodus Perjalanan Dinas Fiktif (Lagi)**  
**Kejari Sekadau Lebih Cepat Bertindak**  
**Ketimbang Kejaksaan Kabupaten Induknya**

**SEKADAU-RK.** Setakat ini, temuan perjalanannya dinas fiktif di 9 dinas dalam lingkungan Pemkab Sanggau, terlihat belum ditindaklanjuti Korps Adhyaksa Kabupaten tersebut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten pecahannya, Sekadau, bergerak lebih cepat dalam menangani modus korupsi yang ditenggarai menjadi tren itu. Kejari Sekadau mengendus dugaan korupsi di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Kabupaten Induknya, Kalimantan Tengah. **Sukardi: Kerugian Negara, Kalau Dikalkulasi, Mencapai Sekitar Rp1 Miliar**

paten Sekadau. Bahkan, mereka sudah menetapkan satu orang tersangka. "Saat ini sudah ada satu tersangka," ujar Sukardi, Kepala

■ Halaman 7





## Kejari .....dari halaman 1

Kejaksanaan Negeri (Kajari) Sekadau, kepada wartawan, usai penandatanganan MoU dengan Kantor BPN Sekadau, Rabu (12/9).

Tersangka dalam kasus tersebut berstatus sebagai PNS dan bekerja sebagai Sekretaris BKPP. "Cuma saya lupa namanya," kata Sukardi.

Dari catatan Rakyat Kalbar, Sekretaris BKPP Kabupaten Sekadau saat ini dijabat oleh Sr. Hanya saja, belum bisa dipastikan apakah Sr ini lah yang dimaksud Sukardi.

Dugaan korupsi di BKPP Sekadau mulai diendus Kejari sejak Mei 2013 lalu. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, Kejari meningkatkan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

"Sprindik (surat perintah penyidikan)-nya keluar 1 Agustus lalu. Kita juga menetapkan status tersangka terhadap yang bersangkutan sejak 1 Agustus 2013," ulas Sukardi.

Menelusuri hal tersebut, Rakyat Kalbar mendapati kasus dugaan tindak pidana korupsi di BKPP mencuat setelah ada laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi penggelapan uang perjalanan dinas tersebut. Modus Tipikor ini diamini Kejari Sekadau.

Menurut Sukardi, selama menjabat sebagai Sekretaris BKPP, yang bersangkutan membuat surat tugas perjalanan dinas palsu atas nama sejumlah Penyuluh. Setelah cair, uang perjalanan dinas penyuluh itu kemudian diambil oleh yang bersangkutan.

Praktis hal ini diprotes oleh para penyuluh. "Kasus ini terjadi sejak 2010 hingga 2012. Total kerugian Negara akibat kasus ini mencapai ratusan juta. Bahkan kalau dikalkulasi secara

keseluruhan, mungkin sekitar Rp 1 miliar," yakin Sukardi.

Sejauh ini pihak Kejari Sekadau sudah memeriksa belasan orang saksi. Sementara ini, dikenakan Undang-Undang Tipikor.

Saat disinggung soal penambahan jumlah tersangka, Sukardi memilih jawaban diplomatis. "Yang satu ini kita sidangkan dulu. Nanti dalam persidangan kan ada keterangannya," tukas Sukardi sembari mengulum senyum.

### Temuan Perjalanan Dinas Fiktif di Sanggau Belum Ditindaklanjuti

Untuk menyegarkan ingatan para penegak hukum, Rakyat Kalbar pernah memberitakan, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalbar, ditemukan perjalanan dinas fiktif dan mark up harga tiket pesawat di lingkungan Pemkab Sanggau. Temuan sebesar lebih kurang Rp 1,8 Miliar, pada tahun anggaran 2012, itu menyenggol 9 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dalam laporan, disebutkan adanya kerugian daerah atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, sebesar Rp 1.799.314.400, dan kelebihan harga tiket sebesar Rp 2.293.500. Kerugian daerah dirinci sebagai realisasi belanja dinas pada Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2012. Jika ditelisik, hal itu masuk dalam pelanggaran hukum dan bisa dijerat dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi alias Tipikor.

Pemeriksaan BPK tersebut dilakukan secara uji petik atas bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah,

berupa tiket pesawat pada Sekretariat DPRD (Setwan), Sekretariat Daerah (Setda), Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan (Distankanak), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM (Disperindagkop UKM), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sanggau.

BPK bersandar kepada bukti Surat Tugas (ST), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Buku Kas Umum (BKU), kwitansi pembayaran perjalanan dinas, tiket pesawat dan boarding pass.

Hasil pengujian tiket pesawat ke dokumen manifest pesawat dari PT. Angkasa Pura mengkonfirmasi adanya ketidaksesuaian data penerbangan yang tercantum pada tiket. Ditemukan serial number tiket, code booking, nama penumpang, tanggal dan tujuan penerbangan, yang tercantum pada tiket tidak sesuai dengan data base penerbangan. Masih menurut LPH BPK tersebut, ada keterangan dari masing-masing pegawai/pejabat terkait di lingkungan Setwan (termasuk anggota dewan), Setda, Distankanak, Dinas ESDM, Disperindagkop, Dishubkominfo, Dinkes, BKD dan Bappeda, pada tanggal 10-16 April 2013. Diketahui, terdapat 137 pegawai/pejabat yang tidak dapat menunjukkan bukti sah melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp1.799.315.400.

Dari uji petik yang dilakukan, pada tanggal 10-16 April 2013,

ditemukan pula 3 pegawai yang menaikkan harga tiket saat melaksanakan perjalanan dinas sebesar Rp2.293.500,00. Namun, terhadap kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan dan kelebihan pembayaran harga tiket pesawat sebesar Rp 1.801.608.900—dilakukan oleh sejumlah pejabat dan pegawai— itu, telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 623.959.800.

Selanjutnya, BPK merekomendasikan atas temuan tersebut, Bupati Sanggau diminta membuat komitmen dalam bentuk Pakta Integritas agar di kemudian hari tidak terjadi lagi permasalahan kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan. Serta mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

BPK juga merekomendasikan agar Bupati Sanggau memerintahkan pejabat dan pegawai pada SKPD terkait supaya menyetorkan kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas sebesar Rp 1.177.649.100 (Rp 1.801.608.900 - Rp 623.959.800).

Bupati Sanggau juga diminta untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada sembilan SKPD terkait, selaku pengguna anggaran, supaya lebih optimal dalam pengendalian atas pembayaran dan pelaporan pelaksanaan perjalanan dinas.

Hingga kini, belum ada informasi apakah sudah ada penyelidikan dari aparat per egak hukum di Sanggau terka temuan tersebut.

Laporan : Abdu Syukri  
Editor : Mohamad iQbaL